

Laporan Studi Lapangan :

Pornografi Dalam Media: Kuncinya Sosialisasi dan Kecerdasan Bermedia

Oleh : Tim Redaksi

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan masalah pornografi, kali ini menyangkut kasus beredarnya video porno di jaringan internet yang diduga melibatkan beberapa artis dan kalangan selebritis papan atas. Kontan kasus ini mendapat respons yang sangat keras dari berbagai kalangan, termasuk dari jajaran pemerintah sendiri. Pihak kepolisian terus melakukan penyidikan secara intens, bahkan melakukan operasi terhadap anak sekolah yang dianggap rentan terhadap pengaruh pornografi.

Munculnya kasus beredarnya video porno yang diduga melibatkan selebritis tersebut, semakin meyakinkan kembali bahwa media internet di samping memberikan manfaat, tetapi juga sekaligus menyodorkan masalah serius. Potensi penyebarannya yang sangat cepat dan semakin mudah dan murah untuk diakses masyarakat, media ini menjadi semakin berperan dalam berbagai aktivitas komunikasi. Akan tetapi justru kemampuannya yang luar biasa dalam menyimpan dan menyebarkan informasi itu, menjadikan media internet perlu mendapat perhatian serius, terutama jika dikaitkan dengan masalah sosial-budaya masyarakat.



Masalah pornografi itu sendiri sebenarnya sudah bukan persoalan baru, dan bahkan akan terus menjadi topik pembicaraan yang tidak pernah kehilangan aktualitasnya. Pemerintah sendiri bersama DPR telah merespons masalah ini dengan membuat Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Proses pembuatan hingga Undang-undang tersebut telah mendapat reaksi pro-kontra dari segenap elemen masyarakat. Bersamaan dengan itu pemerintah dan DPR juga telah membuat undang-undang yang mengatur akses informasi publik, yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan juga Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Masalah pornografi yang tersebar melalui media penyebarannya juga sampai ke daerah-daerah. Segenap warga masyarakat cukup antusias manakala mendengar munculnya kasus-kasus pornografi yang diduga dilakukan oleh beberapa selebritis. Belakangan ini misalnya yang sedang santer dilansir oleh berbagai media adalah kasus video porno yang diduga melibatkan artis Ariel Peterpan, Luna Maya, dan Cut Tari. Video porno tersebut telah beredar tak terbentuk ke seluruh dunia karena melalui jaringan media internet. Berbagai reaksi telah bermunculan terhadap kasus tersebut, dan cukup menghebohkan masyarakat.

Diskusi yang muncul adalah bagaimana cara efektif membendung pengaruh negatif dalam kasus pornografi. Pemerintah, melalui kepolisian telah melakukan langkah-langkah hukum dengan menyidik perkara tersebut, siapa yang menyebarkan, apa motif di balik itu, dan tidak kurang pelaku pun juga telah diinterogasi. Diskusi pun menyangkut peran dan posisi media dalam kasus pornografi. Bagaimana semestinya media harus menyikapi kasus ini? Apakah hanya pertimbangan bisnis sehingga harus mengeksploitasi pornografi. Sejumlah kalangan mengharapkan, betapa pun media punya kepentingan bisnis, tetapi juga merupakan institusi sosial yang memiliki fungsi mendidik. Karena itu, terhadap pornografi apakah media harus menghadapi dilema mengemban kedua

fungsi tersebut? Tarik-menarik tentu senantiasa terjadi, dan biasanya justru kepentingan bisnis yang lebih dikedepankan, sehingga media selalu mengeksploitasi pornografi karena mengejar sensasi.

Persoalnya, pornografi ketika telah menyebar ke masyarakat harus berhadapan dengan realitas keberagaman kultural maupun tingkat-tingkat perkembangan masyarakat. Di samping itu,

“Masalah pornografi yang tersebar melalui media penyebarannya juga sampai ke daerah-daerah. Segenap warga masyarakat cukup antusias manakala mendengar munculnya kasus-kasus pornografi yang diduga dilakukan oleh beberapa selebritis.”

khalayak itu sendiri juga beragam, terutama ketika media internet telah banyak diakses oleh kalangan terpelajar. Kalangan orangtua pun menjadi resah atas makin merebaknya pornografi, terutam kaitannya dengan perkembangan jiwa murid yang sedang berada dalam proses pembentukan kepribadian.

Bagaimana dinamika pandangan, sikap, dan aksi warga masyarakat di daerah terhadap isu penyebaran pornografi melalui media menjadi menarik untuk dicermati. Studi lapangan ini mencari informasi ke beberapa daerah sebagai pengumpulan bahan menyusun laporan utama penerbitan Jurnal Dialog Kebijakan Publik. Seberapa jauh sebenarnya tingkat keresahan masyarakat terhadap pornografi, dan bagaimana para tokoh masyarakat di daerah menghadapi masalah ini, akan diobservasi melalui kegiatan pengumpulan data lapangan ini.

Lokasi pengumpulan data lapangan diselenggarakan di lims (5) wilayah di Indonesia untuk mendapatkan pendapat publik tentang berbagai masalah di seputar isu pornografi. Kelima lokasi studi lapangan terdapat di beberapa daerah di wilayah Indonesia, yaitu meliputi Padang, Salatiga, Makassar, Manado dan Yogyakarta. Adapun pertimbangan dipilihnya kota tersebut adalah, bahwa di samping untuk mewakili perimbangan teritorial yang mewakili Indonesia bagian barat, tengah dan timur, juga atas

pertimbangan potensi dan karakter sosiokultural daerah tersebut dalam memahami masalah pornografi. Padang misalnya, merupakan wilayah yang memiliki budaya Islam yang kuat bahkan secara politik telah menerapkan norma-norma agama Islam dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Syariat. Sedangkan Yogyakarta merupakan kota pendidikan dan menjadi salah satu basis budaya Jawa yang kuat, dan sedikit banyak kultur Jawa bersikap permisif terhadap erotisme. Sementara itu Salatiga merupakan

kota kecil di daerah yang memiliki tingkat pluralitas cukup tinggi di mana persinggungan antara kultur Jawa, Islam, dan Kristen, serta antaretnis terjadi relatif intensif. Adapun Makasar merupakan perwakilan wilayah timur Indonesia yang telah mengalami industrialisasi dan relatif terbuka dengan pengaruh luar, meskipun secara normatif budaya Islam cukup dominan di daerah ini. Sementara itu Manado adalah daerah yang mayoritas beragama Kristen, dan pandangan hidupnya cukup kosmopolit.

Padang: Semakin Mencemaskan

Orang Padang memiliki pandangan bahwa segala sesuatu harus dikembalikan kepada nilai-nilai agama, dalam hal ini adalah nilai Islam. Dengan kata lain, Islam adalah sebuah rujukan nilai yang kuat untuk mengendalikan perilaku dan tindakan orang. Jika nilai keislaman masyarakat Padang tetap terjaga, maka segala bentuk pengaruh negatif yang datang dari luar akan dapat ternetralisir, dan keseimbangan akan tetap terjaga. Berbagai gejolak sosial yang timbul karena peristiwa politik, kesenjangan ekonomi, dan kriminalitas semuanya adalah karena tidak berusaha menerapkan nilai agama Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Apalagi terhadap pornografi yang diakui belakangan ini semakin meningkat pengaruhnya terhadap generasi muda, akan dengan mudah dinetralisir jika ajaran agama tetap dilaksanakan dengan baik.

Akan tetapi, masyarakat Padang tidak

dapat menyembunyikan kecemasannya terhadap masalah pornografi yang beredar melalui media, khususnya jaringan internet. Sebagian besar warga, khususnya kaum ibu rumah tangga sangat mencemaskan kehadiran internet yang sangat berpotensi membawa dampak negatif. Internet adalah media baru yang akan menciptakan horor bagi kehidupan keluarga. Isu pornografi yang belakangan ini semakin merebak, dan dengan mudah dapat diakses lewat jaringan internet, sungguh mencemaskan warga masyarakat Padang. Inawinda misalnya, seorang ibu rumah tangga, ia langsung memindahkan komputer desktop-nya dari kamar anaknya ke ruang keluarga begitu isu pornografi yang diduga melibatkan Luna Maya dan Ariel beredar luas melalui internet. "Saya khawatir sekali anak saya terpengaruh oleh efek buruk dari pornografi yang tersebar di internet, karena itu komputer di kamarnya segera saya pindah ke ruang keluarga agar anak saya bisa saya kontrol ketika sedang mengakses internet" keluhnya.

Namun demikian ibu rumah tangga ini masih belum bisa menghilangkan kecemasan terhadap anaknya, karena bagaimana pun ia tidak bisa mengontrol bagaimana jika anaknya mengakses internet di luar rumah. Belum lagi sekarang

“Orang Padang memiliki pandangan bahwa segala sesuatu harus dikembalikan kepada nilai-nilai agama, dalam hal ini adalah nilai Islam. Dengan kata lain, Islam adalah sebuah rujukan nilai yang kuat untuk mengendalikan perilaku dan tindakan orang.”

ini teknologi *mobile phone* atau yang lebih populer dengan istilah HP semakin menyodorkan kemudahan-kemudahan akses informasi. Melalui prinsip konvergensi media, HP sekarang dengan mudah berfungsi untuk komunikasi, mengakses internet, televisi, radio, fotografi, dan sekaligus berlangganan surat kabar. HP yang memiliki fitur-fitur canggih yang memberikan kemampuan untuk akses visual, sungguh mencemaskan orangtua terhadap anaknya. Karena itu mereka berusaha sekuat tenaga anaknya hanya boleh menggunakan HP yang hanya untuk komunikasi, bukan yang bisa digunakan untuk fotografi. Pornografi dengan mudah menyebar ke kalangan pelajar melalui HP yang terus berkembang menjadi alat yang praktis dan memberikan fasilitas canggih serta makin murah harganya. "Saya khawatir sekali anak saya mengakses dan menyimpan gambar porno di HP-nya, karena itu saya sering mencuri-curi membuka HP anak saya ketika ia sedang mandi", begitu pengakuan Irnawinda dengan nada cemas.

Akan tetapi Irnawinda tidak setuju jika anak pelajar dilarang membawa HP, karena bagaimana pun HP juga memberikan kemudahan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga yang tersekat oleh jarak dan waktu. Untuk mencegah pornografi melalui HP ia lebih setuju jika peran keluarga harus ditingkatkan. Pengawasan orangtua terhadap anaknya harus diperketat sehingga anaknya terhindar dari pengaruh negatif yang bersumber dari media. Senada dengan pernyataan itu, Kepala Bagian Telematika Biro Humas dan Protokol Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Iswan Akhir memberikan penjelasan bahwa bagaimana pun peran keluarga sangat menentukan dalam menghindari pengaruh buruk pornografi lewat media. Melalui pendidikan agama di lingkungan keluarga dan sekaligus melakukan pengawasan ketat orangtua terhadap anaknya, maka pengaruh buruk pornografi akan dapat dicegah dan tidak menyebar ke anak-anak. "Peran keluarga adalah mutlak untuk menjaga anaknya terhindar dari pengaruh negatif media, apalagi yang berkaitan dengan pornografi", katanya.

Lebih dari itu, Iswan berharap agar pemerintah, terutama Kemkominfo, segera melarang media yang menyebarkan pornografi, termasuk erotisme dalam televisi. Meskipun sekarang ini era liberalisasi media, tetapi bagaimanapun media harus diatur oleh pemerintah, sehingga tidak

semaunya sendiri dalam menyiarkan program yang tidak bermutu dan berekses negatif. Iswan misalnya menyoroti tayangan sinetron yang dianggapnya kurang mendidik. Banyak bintang remaja yang menggunakan anting-anting dan pakaian tidak sopan, sehingga perilaku itu ditiru oleh kalangan remaja di Padang. Sementara itu pemberitaan pornografi juga terlalu dibesar-besarkan sehingga justru masyarakat malah ingin tahu dan berusaha mencari situs-situs porno yang melibatkan artis papan atas di negeri ini. "Pemerintah melalui Kemkominfo harus tegas terhadap media televisi dan internet, agar mengeluarkan larangan terhadap tayangan yang merusak budaya bangsa", kata Iswan tegas. Memang semua itu sulit, karena bagaimanapun media juga institusi bisnis, sehingga kepentingan bisnis lebih sering dikedepankan ketimbang pertimbangan edukatif. Akan tetapi pemerintah juga perlu waspada terhadap budaya luar yang dibawa oleh globalisasi. "Saya berkeyakinan bahwa pornografi juga merupakan bagian dari usaha negara-negara kapitalis besar untuk merusak budaya bangsa Indonesia, sehingga tetap menjadi pasar mereka," Iswan menambahkan.

Berkaitan dengan pornografi, Kemkominfo sebenarnya sudah mengeluarkan larangan terhadap Warnet agar bersih dari pornografi. Akan tetapi oleh masyarakat Padang, larangan itu ditanggapi beragam dan diragukan efektivitasnya. Iwan misalnya, seorang pengusaha Warnet di kawasan Kuranji Padang menilai bahwa kewajiban memasang program antipornografi di Warnet itu sebagai tindakan berlebihan. "Larangan itu terlalu berlebihan, karena tidak akan efektif. Semua itu tergantung pada individu masing-masing, tidak perlu dikhawatirkan karena mereka juga sudah mampu menseleksi mana yang buruk dan mana yang baik", katanya.

Reaksi senada juga datang dari Zaldi, pengusaha Warnet di kawasan Pauh Padang, yang meragukan efektivitas larangan tersebut. "Kewajiban melengkapi Warnet dengan program antipornografi akan sulit diterapkan. Itu hanya akan dipatuhi oleh Warnet di tempat umum, tetapi siapa yang bisa jamin jaringan internet individual yang jumlahnya justru semakin banyak di masyarakat Padang sekarang ini", begitu Zaldi berargumentasi. Lagi pula aturan tersebut jelas akan menurunkan pendapatan

bagi Warnet yang patuh. “Moral bangsa jangan dibebankan pada pengusaha Warnet saja”, tambah Zaldi berdiplomasi.

Akan tetapi di kalangan pengusaha Warnet juga ada suara yang berbeda. Wahyu Muliawan misalnya, seorang pengusaha Warnet di kawasan Pengambiran Padang, setuju dengan larangan dari Kemkominfo tersebut. Selama ini Wahyu sangat ketat mengawasi pengguna internet di Warnetnya agar tidak sampai mengakses situs pornografi. Selain memasang program Nawala untuk antipornografi, ia juga tidak mendesain ruang Warnet dengan bilik-bilik, sehingga seluruh pengguna bisa melihat layar monitor komputer masing-masing. Akan tetapi Wahyu meskipun mendukung kebijakan tersebut, tetapi ia meragukan efektivitas kebijakan tersebut, karena link internet di Indonesia tidak menggunakan satu jalur seperti RRC, sehingga sulit dikontrol secara sentralistik oleh pemerintah.

Untuk membendung merebaknya pornografi di kalangan pelajar, sekolah-sekolah telah menerapkan pengawasan terhadap siswa terutama untuk kepemilikan HP. Kepala Sekolah Menengah Umum 10 Padang, Syafarni Budi Putra, telah menerapkan kontrol ketat terhadap siswa dalam kepemilikan HP. Para siswa dilarang membawa HP yang memiliki kegunaan untuk fotografi. Di SMU ini juga secara rutin dilakukan pemeriksaan mendadak terhadap HP siswa oleh guru Pembina siswa. “Selama ini saya belum menemukan siswa yang HP-nya menyimpan gambar porno”, kata Amirul Zainuddin, guru agama yang sekaligus Pembina Osis SMU 10 Padang. Di samping itu, agar siswa tidak melakukan tindakan penyimpangan sosial, sekolah terus membuat sibuk murid dengan memberikan tugas-tugas pelajaran yang banyak. Cara ini untuk mengalihkan energi emosional siswa agar tidak digunakan untuk melihat situs pornografi. “Jika anak dibuat sibuk untuk urusan pelajaran, maka mereka mesti tidak sempat lagi melakukan hal-hal yang negatif”, kata Syafarni mantap.

Kebijakan sekolah tersebut sepertinya berdampak signifikan dengan tingkat kesibukan siswa. Mirna, salah seorang siswa SMU 10 mengaku bahwa selama ini dia sama sekali tidak pernah mengakses situs pornografi di internet. Ia lebih suka mengakses internet untuk keperluan mencari informasi yang relevan dengan

pelajarannya. “saya sering membuka situs think.com yang banyak membantu dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah”, begitu pengakuan Mirna.

Potensi pengaruh negatif internet sebenarnya tidak hanya pada kelompok rentan, seperti anak sekolah dan kaum remaja pada umumnya. Akan tetapi juga bagi kalangan masyarakat bawah pada umumnya. Iswandi mengungkapkan bahwa di kalangan warga miskin, pengaruh pornografi lewat media justru sangat terasa. Mereka adalah kelompok berpedidikan rendah dan miskin, sehingga sangat rentan terhadap pengaruh negatif media, karena itu perkosaan sering terjadi di komunitas ini.

Namun demikian, pada masyarakat desa sudah tumbuh kesadaran bahwa internet merupakan media yang berpotensi besar dalam membawa pengaruh negatif terhadap budaya Padang yang islami. Menurut Iswandi, ketika mengenalkan internet lewat program *Community Acces Point* (CAP), masyarakat segera merespons dengan kecemasan tinggi akan pengaruh internet bagi warga masyarakat desa di Padang. “Pengalaman saya menunjukkan, bahwa orang desa sangat kritis terhadap inovasi yang hadir ke wilayahnya. Ketika saya perkenalkan bahwa internet memiliki dampak positif maka mereka akhirnya bisa menerima”, kata Iswandi. Ia juga kemudian mengenalkan program Internet Sehat kepada warga masyarakat desa, dan cukup mendapat sambutan antusias. Untuk tahun anggaran 2010 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menganggarkan untuk 40 nagari (desa) untuk sosialisasi Internet Sehat.

Salatiga : Pendekatan Kultural

Salatiga merupakan kota yang dihuni oleh warga umat Islam dan Kristen yang cukup berimbang dilihat dari segi jumlah. Banyak sekolah yang didirikan oleh yayasan umat Kristiani yang mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat pra-sekolah hingga perguruan tinggi. Universitas Satya Wacana yang didirikan oleh yayasan umat Kristiani merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia. Demikian pula lembaga sekolah berbasis umat Islam cukup banyak berdiri di kota ini, baik dari organisasi keagamaan NU maupun Muhammadiyah.

Baik sekolah dari kalangan Islam maupun Kristiani menolak keras terhadap pornografi, karena dapat merusak moral bangsa. Beberapa masyarakat dari kalangan Kristiani sebenarnya kurang setuju dengan Undang-Undang Pornografi, karena persoalannya lebih bersifat kultural sehingga persoalannya diserahkan kepada

warga masyarakat sendiri-sendiri sesuai dengan konteks sosial-budaya masing-masing. Tidak perlu masalah pornografi ditangani langsung oleh negara, karena akan rentan dipolitisir.

Samuel misalnya, seorang pengajar di Universitas Satya Wacana, memberikan pendapat bahwa pornografi harus dilihat dari aspek kultural. Negeri ini memiliki derajat pluralitas yang tinggi, sehingga tafsir terhadap pornografi sangat beragam sesuai dengan konteks kultural masing-masing entitas budaya. Orang Bali misalnya, dahulu memiliki tradisi bahwa perempuan kelihatan payudaranya bukanlah porno, itu menjadi bagian dari kultur mereka. Demikian pula beberapa suku Dayak pedalaman di Kalimantan Tengah, anak-anak gadis kelihatan payudaranya bukan sesuatu yang tabu dan porno dalam konteks budaya mereka. Orang Jawa sendiri memiliki erotisme lewat berbagai seni pertunjukan, seperti seni tayuban dan ludruk Surabaya yang seringkali

secara vulgar mengungkapkan kata-kata erotis dalam dialog panggungnya.

Akan tetapi Samuel juga prihatin dengan maraknya pornografi yang menyebar pada berbagai media, khususnya internet. Teknologi informasi yang semakin canggih ternyata juga memberikan dampak negatif ketika media jejaring itu hanya dilihat dari kemudahan akses terhadap hal-hal yang bersifat rekreatif. Oleh karena itu perlu adanya pendidikan bermedia yang benar, agar masyarakat menyadari bahwa media uta-

“
Seorang pengajar di Universitas Satya Wacana, Samuel lebih setuju agar pornografi dan berbagai situs rekreatif lainnya tidak banyak diakses oleh masyarakat atas kesadaran dan pertimbangan masyarakat itu sendiri. Semakin masyarakat memiliki budaya media yang tinggi, maka pemanfaatan media akan cenderung ke arah yang lebih positif dan demi kepentingan produktif.”

manya adalah berfungsi untuk mendidik dan mencerdaskan masyarakat. Samuel lebih setuju agar pornografi dan berbagai situs rekreatif lainnya tidak banyak diakses oleh masyarakat atas kesadaran dan pertimbangan masyarakat itu sendiri. Semakin masyarakat memiliki budaya media yang tinggi, maka pemanfaatan media akan cenderung ke arah yang lebih positif dan demi kepentingan produktif.

Sayangnya media massa sekarang ini cenderung mengedepankan kepentingan komersial, sehingga banyak program siaran yang disodorkan kepada publik kurang memiliki kandungan edukatif. Kabag Pengelolaan Informasi Kantor Humas Provinsi Jateng, Noeng Nugroho Rachmadi misalnya, menilai bahwa pemberitaan pornografi oleh media sekarang ini terlalu berlebihan dan cenderung didramatisir hanya demi kepentingan menaikkan rating. Meskipun dalam era liberalisasi media hal itu sah-sah saja,

tetapi Noeng berharap agar media secara internal melakukan kontrol sendiri, mana yang sekiranya patut dan tidak patut dalam konteks masyarakat Indonesia. Bukan malah mengeksploitir pemberitaan pornografi, sehingga pemberitaan kasus Ariel dan Luna Maya misalnya, ada kesan menjadi cerita bersambung yang tidak pernah berhenti. “Kalau menyangkut pornografi, media terkesan membuat pemberitaan seperti kisah yang *never ending*”, kata Noeng.

Pemerintah Jawa Tengah sendiri telah memberikan respons cepat terhadap maraknya pornografi yang menyebar lewat jaringan internet. Gubernur telah mengeluarkan perintah agar kalangan kantor pemerintahan memblokir situs yang mengandung pornografi selama 24 jam. Di samping itu, Pemprov Jateng telah menyebarkan stiker yang berisi himbuan bahaya pornografi di sekolah-sekolah. Meskipun belum mengeluarkan Perda tentang larangan membawa HP bagi anak sekolah, tetapi Noeng setuju jika anak sekolah dilarang membawa HP, atau paling tidak untuk HP yang bisa berfungsi mengakses gambar porno.

Noeng berpendapat bahwa kunci utamanya ada dalam lembaga keluarga. Bagaimana pun keluarga adalah pilar utama dalam membangun kepribadian anak. Maraknya pornografi harus mendapat perhatian serius bagi para orangtua. Repotnya kesadaran akan bahaya pornografi hanya tumbuh di kalangan kelas menengah ke atas, sedangkan di kalangan kelas bawah masih cenderung abai terhadap masalah pornografi. “Untuk keluarga kelas menengah saya optimis, pengawasan terhadap anak dalam kaitan dengan pornografi sudah cukup efektif. Akan tetapi untuk kalangan kelas bawah sayangnya belum tumbuh kesadaran yang tinggi, bahkan cenderung abai terhadap masalah ini”, kata Noeng prihatin.

Oleh karena itu Noeng setuju bahwa untuk menanggulangi bahaya pornografi dalam arus liberalisasi media sekarang ini harus dimulai dari bawah, yaitu dengan mendorong masyarakat agar selektif dalam mengakses informasi melalui media. Untuk itu gerakan melek media atau *media literacy* menurut Noeng adalah sesuatu yang imperatif, di samping peran pemerintah juga sangat menentukan. “Semuanya harus berjalan simultan, ada yang bergerak dari atas dan ada

yang dari bawah. Pemprov Jateng akan segera mendorong pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kebijakan, sementara masyarakat sendiri perlu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemanfaatan media secara positif melalui gerakan melek media”, ujarnya. Sedangkan untuk kalangan terpelajar, Noeng sangat setuju agar lembaga sekolah dalam upaya menangkal bahaya pornografi sekarang ini, menggalakan kembali pendidikan budi pekerti.

Upaya itu juga disetujui oleh Domas, seorang Pembina siswa SMP Pangudiluhur Salatiga, bahwa pendidikan budi pekerti adalah kunci penting untuk memberikan bekal moral bagi murid. Domas memberikan informasi bahwa di lembaga sekolahnya, siswa tidak diperbolehkan membawa HP, kalau toh terpaksa ada siswa boleh membawa HP, harus dikumpulkan di kantor kesiswaan dan harus mendapat izin sekolah.

Sementara itu Guru Bimbingan Konseling MTs Negeri Salatiga, Rita Budiarti, mengaku telah menangkap beberapa muridnya yang ketahuan membawa CD dan HP yang bermuatan pornografi. Peristiwa ini menjadi indikator betapa pornografi juga sudah masuk di kalangan pelajar. Oleh karena itu, Rita terus memantau perilaku murid dan memberikan bimbingan terus-menerus tentang bahaya pornografi dan Narkoba. Sekolah ini juga sering melakukan operasi mendadak terhadap HP murid, dan menerapkan kebijakan bagi siswa yang membawa HP harus dititipkan pada guru piket. “Kontrol semacam itu penting dilakukan pada murid, karena HP sekarang ini begitu rentan terhadap pornografi”, tegasnya. Namun ia juga tidak berani menjamin bagaimana perilaku anak dalam menggunakan HP di luar sekolah, apakah tertib atau tidak. Oleh karena itu tanggung jawab orangtua menjadi penting untuk terus mengawasi anaknya dalam memanfaatkan HP dan *media Online*.

Rita sangat setuju terhadap wacana pendidikan seks bagi pelajar. Pendidikan seks sejak usia sekolah adalah penting untuk mengenalkan bagaimana misalnya proses reproduksi manusia. Juga menjadi kewajiban sekolah untuk mendidik bagaimana agar siswa bersikap wajar ketika melihat alat reproduksi manusia. Sepanjang itu diletakkan dalam konteks pendidikan, maka anak akan menyikapi secara wajar. Juga memberikan

pemahaman tentang bagaimana cara berpacaran yang edukatif dan memotivasi belajar. Sepanjang pengetahuannya, di Salatiga perilaku berpacaran kalangan pelajar masih dalam batas-batas kewajaran. Lagi pula kultur masyarakat Salatiga cukup terbuka dengan perilaku berpacaran anak sekolah yang berboncengan, atau jalan begandengan tangan, dan belajar bersama.

Makassar: Kuncinya adalah Peran Pemerintah

Isu pornografi dalam media, khususnya *media on-line* seperti internet, bagi warga Makassar cukup mendapat perhatian luas. Pemerintah sendiri langsung memberikan respons untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran yang lebih masif, terutama di kalangan kelompok rentan seperti pelajar dan anak-anak pada umumnya. Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, dan Polwil-tabes langsung mengadakan pertemuan untuk memberantas pornografi. Walikota bersama jajaran Dinas Infokom terus melakukan sosialisasi Undang-Undang Pornografi kepada kalangan pelajar dan Mahasiswa. “Sosialisasi ini penting, terutama pada kalangan pelajar dan mahasiswa, karena merekalah yang merupakan kelompok rentan terhadap pengaruh pornografi yang menyebar melalui media”, kata Abdul Samad Junet, Sekretaris Dinas Infokom Kota Makassar.

Sosialisasi Undang-Undang Pornografi menjadi sebuah keharusan dalam upaya memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan bahaya pornografi yang tersebar melalui media. Akan tetapi menurut Juned meski pemerintah terus melakukan sosialisasi, tetapi masih belum menyentuh ke seluruh masyarakat. Hal ini juga diakui oleh penggiat LSM Pendidikan dan Kesehatan Karya Nyata, Mat Tawang,

bahwa sosialisasi Undang-Undang Pornografi masih belum menyentuh warga masyarakat kalangan bawah. “Seharusnya pemerintah mengajak kalangan LSM dan segenap elemen masyarakat lain untuk melakukan sosialisasi berbagai Undang-undang, termasuk Undang-undang Pornografi secara terus-menerus kepada kalangan warga masyarakat bawah. Karena

“Masyarakat Makassar meminta agar media selektif dalam menyiarkan pemberitaan di seputar isu sensitif, seperti pornografi. Meskipun harus diakui bahwa sulit sekali mengontrol media, terutama *media on-line* seperti internet dalam menyebarkan pesan kepada khalayak.”

justu di sanalah berbagai tindak yang masuk dalam kategori pornografi sering terjadi”, katanya meyakinkan.

Hampir semua informan mengatakan bahwa sebegitu jauh efektivitas Undang-undang tersebut dalam mengurangi tindak pornografi dan pornoaksi masih belum memberikan hasil yang signifikan. Meskipun ketika dalam proses pembuatan Undang-undang tersebut mendapat perhatian luas dari kalangan masyarakat, tetapi setelah diundangkan masih belum ada tindak lanjut. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Azwar Hasan, dosen Universitas Hasanudin Makasar, meski sudah ada landasan normatif,

yaitu Undang-Undang Pornografi, tetapi implementasinya tidak maksimal. “Jarak antara waktu ditetapkannya Undang-undang tersebut dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan terlalu lama. Sebaiknya setelah sebuah undang-undang diundangkan segera dikeluarkan peraturan pelaksanaan, sehingga sosialisasi Undang-undang dan peraturan pelaksanaan bisa dilakukan secara bersamaan, dengan demikian hasilnya akan lebih efektif”, tegasnya.

Menyinggung peran media dalam menyebarkan pornografi, beberapa informan sepakat agar media selektif dalam menyiarkan pemberitaan di seputar isu sensitif, seperti pornografi. Namun harus diakui bahwa sulit sekali mengontrol media, terutama media on-line seperti internet dalam menyebarkan pesan kepada khalayak. Internet ibarat pedang bermata dua, ada sisi positif dan negatifnya yang keduanya sama-sama tajam. Oleh karena itu persoalannya adalah bagaimana mengoptimalkan peran positifnya bagi masyarakat. Tidak ada jalan lain kecuali masyarakat harus terus didorong agar lebih cerdas melalui program melek media (*media literacy*). Hasan memberikan penjelasan bahwa teknologi komunikasi dan informasi itu ibarat pedang bermata dua, karena itu harus dicegah agar teknologi tidak mengalami disfungsi bagi kepentingan yang lebih baik. Teknologi harus difungsikan untuk kepentingan yang positif, dan ini menuntut transformasi kultural di kalangan para pengguna teknologi, sehingga akan dapat meminimalisir kecenderungan ke arah pemanfaatan yang negatif, seperti menyebarkan pornografi.

Akan tetapi arus modernisasi dan globalisasi informasi sekarang ini memang membuat nilai-nilai dalam masyarakat menjadi bergeser. Permisivitas masyarakat terhadap pornografi juga sedang terjadi akibat pergeseran nilai-nilai yang dibawa oleh modernisasi. Gaya hidup modern yang tercermin dalam cara berpakaian dan penampilan menunjukkan ke arah yang lebih erotis dan bahkan sensual. Anak-anak muda banyak memakai baju yang mempertontonkan bagian-bagian tubuh yang sensitif, dan masyarakat menganggap hal itu sudah biasa. Norma sosial yang bersumber dari ajaran agama atau budi pekerti agar berpenampilan sopan seperti sudah

tidak efektif lagi, atau paling tidak sopan itu sendiri mengalami redefinisi di kalangan anak muda sekarang. “Media berperan menentukan dalam menyebarkan berbagai pesan yang berpengaruh terhadap pergeseran nilai-nilai tersebut, sehingga menimbulkan permisivitas terhadap praktik pornografi dan pornoaksi saat ini,” kata Ketua PRSS-NI Makasar, Darul Aqsa.

Lantas siapa yang harus bertanggung jawab terhadap semakin marak dan mudahnya pornografi dalam era liberalisasi media sekarang ini? Hampir semua informan setuju jika masalah tersebut harus menjadi tanggung jawab bersama. Kalangan media, lembaga sekolah, lembaga keluarga, lembaga agama, LSM, dan pemerintah perlu bahu-membahu mengatasi bahaya pengaruh negatif pornografi. Akan tetapi oleh karena infrastruktur, perangkat normatif, dan kewenangan lebih banyak di pegang pemerintah, maka pemerintahlah yang paling bertanggung jawab. “Maraknya pornografi dan pornoaksi dalam media yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah. Sebab pemerintahlah yang memegang kekuasaan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Demikian pula KPID dan KPI juga harus bertanggung jawab terhadap siaran media yang dapat merusak moral bangsa”, kata Abbas, Sekretaris DPP Ikatan Masjid dan Mushalla Indonesia (Mutahidah).

Selanjutnya Abbas berpendapat bahwa untuk lebih efektif dalam memberantas praktik pornografi, mau tidak mau hukum harus ditegakkan. Peran agama juga sangat penting dalam mendidik moral bangsa agar tidak berbuat maksiat. Suara senada juga datang dari Ummy Khaerati Syam, seorang tokoh masyarakat, bahwa untuk memberantas pornografi yang penting adalah bahwa sanksi hukum harus dilaksanakan secara tegas kepada para pelaku. Jika sanksi tidak pernah diterapkan, maka tidak akan ada efek jera terhadap para pelaku pornografi. Ummy juga berpendapat bahwa peran lembaga sekolah sangat penting dalam memberikan pendidikan agama kepada murid, agar tidak melakukan tindakan asusila.

Manado: Kuncinya Adalah Sosialisasi

Isu pornografi yang diduga melibatkan artis papan atas belakangan ini cukup mendapat respons masyarakat Manado, karena pemberitaan media massa yang terus-menerus dalam jangka waktu relatif lama. Pada prinsipnya warga Manado menyayangkan mengapa gambar porno tersebut bisa beredar ke masyarakat melalui jaringan internet. Sejumlah kalangan, khususnya orangtua sangat prihatin terhadap merebaknya adegan porno artis tersebut, karena bisa mengundang rasa ingin tahu kalangan anak-anak. "Jika gambar porno tersebut dilihat anak-anak, tentu akan sangat membahayakan, pornografi bagaimanapun bisa merusak moral generasi muda", kata Marion, Pemimpin Redaksi Harian Manado Post.

Menurut Marion media pada prinsipnya ikut mencegah efek negatif pornografi, sehingga cara memberitakannya sangat selektif dan bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak. Misalnya pemberitaan razia situs dan gambar porno yang dilakukan oleh jajaran aparat kepolisian, pers harus memberitakan peristiwa tersebut dengan harapan agar masyarakat mengetahui bahwa pornografi dilarang pemerintah, sehingga ada efek jera. Memang sekarang sudah ada UU Pornografi yang mencegah praktik pornografi dan pornoaksi, akan tetapi pengetahuan masyarakat Manado akan undang-undang tersebut masih relatif minim, karena kurangnya sosialisasi. Boleh jadi ketidakpopuleran undang-undang tersebut antara lain juga disebabkan karena sejak dalam proses pembuatannya masyarakat Manado rata-rata menolaknya. Penolakan tersebut dilatarbelakangi masalah kultural, karena permisivitas orang Manado terhadap penampilan yang ekspresif, sama seperti kultur di Bali dan Papua. "Sebenarnya jika masyarakat mengetahui isinya, mungkin akan dapat menerima tentang semangat keprihatinan undang-undang tersebut terhadap semakin maraknya praktik pornografi", ujar Marion.

Minimnya sosialisasi UU Pornografi ini juga

dikatakan oleh Dirut LSM Suara Perempuan Sulawesi Utara, Lely Jenaan, yang menilai bahwa sosialisasi selama ini hanya menyentuh kalangan elite, sedangkan terhadap masyarakat bawah sama sekali belum dilakukan. "Jangankan materi atau isinya, warga masyarakat biasa di Manado ini dengar nama undang-undangnya saja belum pernah", kata Lely. Oleh karena itu ia berpendapat bahwa kunci pemberantasan pornografi salah satunya adalah sosialisasi secara terus menerus dan terprogram, khususnya

“Media sebaiknya didorong untuk menyiarkan atau memberitakan kegiatan-kegiatan yang positif dan edukatif, karena itu kalangan media perlu terus bekerja sama dengan pemerintah.”

kepada lapisan masyarakat bawah.

Marion mengakui bahwa ada juga media yang mengeksploitir berita di seputar pornografi untuk kepentingan bisnis media, terutama media elektronik. Berita-berita dalam Infotainment misalnya, memang cenderung melanggar UU Pornografi, meskipun kemudian mengoreksi dan kalifikasi agar tidak terjerat oleh undang-undang tersebut. Media sebaiknya didorong untuk menyiarkan atau memberitakan kegiatan-kegiatan yang positif dan edukatif, karena itu kalangan media perlu terus bekerja sama dengan pemerintah, termasuk sosialisasi kebijakan pemerintah. "Manado Post misalnya, selama ini ikut serta dalam mengkampanyekan penggunaan internet sehat agar menghindari situs-situs negatif, bahkan kalau perlu diblokir. Demikian pula kalangan orangtua dihimbau agar tetap waspada terhadap perilaku anaknya dalam mengakses informasi di internet, agar jangan sampai mengakses situs negatif", kata Marion.

Baik Marion maupun Lely sepakat, bahwa sikap tegas pemerintah terhadap pornografi adalah mutlak, karena selama ini terkesan kurang tegas terhadap pelaku penyebar pornografi.

Indonesia harus meniru China yang tegas terhadap jaringan internet, misalnya melarang warganya menggunakan face book. Jika pemerintah mengontrol secara ketat terhadap pelaku jejaring media, tentu akan efektif dalam mengendalikan praktik pornografi yang menyebar lewat situs-situs di internet. Selama ini Indonesia sudah mempunyai perangkat peraturan yang baik, tetapi lagi-lagi persoalannya adalah implementasinya di lapangan sering tidak efektif, karena kurangnya komitmen dalam menegakkan peraturan.

Tokoh agama Kristen dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Utara, Nico Gara misalnya, juga menilai bahwa meskipun sudah ada UU Pornografi dan peraturan lainnya, tetapi itu belum menjadi jaminan efektivitas pencegahan pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat. Sebagai apa pun peraturannya, tetapi jika penegakan hukum lemah, maka perilaku masyarakat juga tidak berubah. Akan tetapi Pendeta Nico berpendapat bahwa yang paling penting adalah upaya preventif dalam mencegah pornografi. "Kita harus melakukan sesuatu agar perilaku masyarakat bermoral baik. Untuk mencegah pemberitaan dan penayangan film dan gambar porno oleh media, maka masyarakat perlu didorong untuk aktif mengawasi media, karena peredaran pornografi lewat media, khususnya internet, sudah sangat mengawatirkan", tegasnya.

Sementara itu Kabid Pemerintahan dan Humas

Kantor Pemerintahan Provinsi Sulut, Roy Turnewa memberikan keterangan bahwa Pemerintah Provinsi Sulut selama ini selalu melibatkan tokoh agama untuk memperkuat kebijakan yang ditujukan bagi pembinaan masyarakat. Berkaitan dengan masalah pembinaan masyarakat dalam menyikapi maraknya pornografi, pemerintah senantiasa mendengarkan dan mempertimbangkan suara dari kalangan tokoh agama.

Hampir semua informan setuju dalam upaya mengurangi dan mengantisipasi dampak buruk pornografi yang marak di media, peran lembaga keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan sangat penting. Bagaimanapun peran orangtua sangat menentukan dalam mengawasi perilaku anak ketika menggunakan media internet, termasuk penggunaan HP. Sekolah juga merupakan lembaga yang perlu terus peduli terhadap persoalan ini. Oleh karena itu, hampir semua informan sepakat akan perlunya pendidikan seks bagi anak sekolah. Tentu saja materi perlu disusun hati-hati, disesuaikan dengan kerangka referensi anak. "Pendidikan seks di sekolah memang perlu, tetapi terlebih dahulu disiapkan kurikulum dan panduan yang jelas. Sebab ini menyangkut isu sensitif, jika tidak hati-hati malah dapat mendatangkan masalah penyimpangan anak", kata Thomas Raharjo, seorang guru SMP di Manado.

Yogyakarta : Kecerdasan Bermedia

Yogyakarta merupakan kota yang memiliki orientasi kebudayaan Jawa yang masih kuat. Kebudayaan Jawa sendiri boleh dikatakan relatif permisif terhadap pornografi, dalam arti tidak serta-merta penampakan erotis hanya dilihat dari aspek fisik. Dalam pandangan Jawa, penampakan bagian-bagian tubuh sensitif bukan faktor utama menimbulkan hasrat nafsu birahi.

Yogyakarta merupakan bukan sekadar kota pendidikan, tetapi dalam kaitan dengan terpaan media on-line, kota ini menempati urutan pertama. Oleh karena itu akses terhadap internet, terutama dari kalangan pelajar dan mahasiswa sangat tinggi. Pemerintah Provinsi DIY sendiri telah menetapkan daerah ini sebagai *cyber* provinsi, meskipun hingga sekarang masih belum semua pelayanan publik berbasis ICT. Akan tetapi dilihat dari antusiasme dan kesemarakannya pemanfaatan media massa dan media on-line, warga kota Yogyakarta boleh dikatakan sudah relatif familier

dengan informasi berbasis media. Oleh karena itu, ketika marak isu pornografi melalui media internet baru-baru ini, reaksi dan respons masyarakat Yogyakarta cukup ramai dan sekaligus kritis.

Lebih dari itu, Yogyakarta merupakan kota yang memiliki orientasi kebudayaan Jawa yang masih kuat. Pandangan warga Yogyakarta dalam melihat isu pornografi sudah tentu merujuk pada akar budayanya. Kebudayaan Jawa sendiri boleh dikatakan relatif permisif terhadap pornografi, dalam arti tidak serta-merta penampakan erotis hanya dilihat dari aspek fisik. Dalam pandangan Jawa, penampakan bagian-bagian tubuh sensitif bukan faktor utama menimbulkan hasrat nafsu birahi. Oleh karena itu, terminologi maksiat sering menjadi perdebatan yang cukup sengit antara perspektif sub kultur santri dengan pendukung budaya Jawa.

Darmanto, peneliti BPPI Kemkominfo Yogyakarta, memberikan penjelasan karakter kultural masyarakat Yogyakarta dengan merujuk pada Clifford Geertz yang membagi tiga tipologi budaya masyarakat Jawa, yaitu priyayi, santri, dan abangan. Tipologi masyarakat yang berbudaya priyayi dan abangan dalam melihat pornografi selalu merujuk pada kebudayaan Jawa, sedangkan warga santri merujuk pada nilai-nilai Islam. Kalangan priyayi dan abangan cenderung tidak terlalu mempermasalahkan terhadap tampilan yang jika diukur dari nilai-nilai Islam masuk kategori erotis. "Ukuran erotisme dalam perspektif kebudayaan Jawa memang berbeda parameternya dengan Islam. Bagi orang Jawa penampilan yang memperlihatkan sebagian tubuh sensitif tidak serta-merta mengundang birahi. Karena itu wanita Jawa yang memakai kemben di mana memperlihatkan sebagian dada dan pundak dianggap biasa, dan tidak menjadi masalah jika anak muda menggunakan rok mini", kata Darmanto.

Bahkan menurut Saefudin Zuhri, seorang dosen Pancasila dan Agama Islam sebuah PTS di Yogyakarta menambahkan, bahwa bagi orang desa yang berkultur abangan dan juga santri Nahdliyin, orang mandi di sendang atau buang air besar di sungai antara laki-laki dan perempuan saling-melihat merupakan suatu hal yang biasa. Mereka juga tidak lantas terangsang birahinya, karena semua itu berada dalam koteks budayanya.

"Di desa-desa Jawa tidak pernah ada kasus-kasus perkosaan, karena nilai-nilai kulturalnya sangat kuat. Orang desa yang memiliki budaya komunal di mana relasi sosial yang erat sekaligus merupakan kontrol perilaku. Perkosaan hanya terjadi di daerah urban atau perkotaan yang mengalami individualisasi", kata Saefuddin.

Akan tetapi merebaknya situs pornografi di jaringan internet, di Yogyakarta juga cukup marak. Sudah menjadi cerita biasa jika perilaku pelajar atau mahasiswa di warnet-warnet mengindikasikan ke arah seksualitas. Hardoko, seorang pengusaha Warnet memberikan informasi, bahwa akses situs porno pengguna Warnet memang cukup terasa. Sebagai indikator misalnya, beberapa pegawainya pernah menemukan flash disk salah seorang pengguna internet yang tertinggal, dan isinya koleksi gambar porno. Bahkan pegawainya juga pernah menemukan ceceran sperma di salah satu biliknya, karena pengguna internet terangsang oleh gambar porno. "Kejadian seperti itu merupakan hal yang sering terjadi di Warnet-warnet", katanya.

Berbeda dengan kota-kota lain, Yogyakarta tidak melarang anak-anak sekolah tingkat SMP membawa HP. SMP 8 misalnya, tidak ada larangan bagi murid membawa HP, semuanya diperbolehkan dibawa sendiri-sendiri tanpa harus ditiptkan pada guru piket. Akan tetapi tidak pernah ada siswa ketahuan HP-nya ada gambar porno. HP lebih sebagai alat komunikasi dan untuk kepentingan yang positif. Boleh jadi karena SMP ini merupakan salah satu favorit sehingga energi siswa lebih tersita untuk kegiatan belajar dan tidak sempat untuk melihat gambar porno. "Prinsipnya anak dibekali budi pekerti, maka mereka akan mengontrol diri sendiri", kata Hariyanto, seorang ahli pembelajaran dari UNY.

Hampir semua informan sepakat bahwa pornografi harus dilihat dari multi perspektif, bukan dari satu sisi saja. Lebih dari itu, kecerdasan bermedia merupakan hal yang harus dipandang sebagai suatu yang imperatif dalam mencegah kecenderungan khalayak memanfaatkan situs-situs negatif. Tesisnya jika kecerdasan bermedia sudah semakin tinggi, maka pemanfaatan internet akan cenderung untuk kepentingan yang produktif dan edukatif. Serba

larangan untuk pornografi tidak otomatis efektif, karena secara teknologis akan bisa disiasati oleh pengguna. "Oleh karena itu biarkan masyarakat menseleksi sendiri informasi yang diakses dari media internet", kata Darmanto yang juga aktif dalam gerakan literasi media.

pendekatan partisipatif dan emansipatoris, gerakan melek media ini akan dapat menjadi pilihan dalam upaya memberantas pornografi dan berbagai efek negatif media lainnya. Jika kecerdasan media ini sudah menjadi perilaku budaya dalam masyarakat kita, maka berbagai tayangan yang tidak bermutu akan dengan sendirinya terseleksi oleh khalayak.

Penutup

Memperhatikan respons pemerintah dan segenap elemen masyarakat terhadap persoalan semakin merebaknya pornografi melalui media, setidaknya terdapat dua gejala menarik. Pertama, berkembang persepsi bahwa posisi media tetap menentukan dan memiliki kekuatan dalam mempengaruhi khalayak, sedangkan khalayak tetap dipandang sebagai entitas yang pasif. Pandangan yang deterministik teknologi ini tampak jelas pada persetujuan semua informan bahwa media harus diatur secara ketat agar tidak menyampaikan informasi yang negatif, karena media sangat powerful dalam mempengaruhi khalayak. Melalui lembaga regulator media seperti Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers, masyarakat berharap agar semakin efektif dalam memonitor media.

Kedua, dalam kaitan dengan isu pornografi, masyarakat tetap menganggap penting struktur-struktur seperti agama, negara, dan segenap aturan perundangan dalam memberantas praktik pornografi. Tesis yang mengemuka selalu mengkaitkan hubungan signifikan antara ketatnya kepatuhan normatif dengan praktik pornografi. Semakin individu dan kelompok patuh dalam ajaran agama dan negara (UU Anti Pornografi), maka praktik pornografi dan pornoaksi akan semakin diminimalisir, betapa pun kuatnya pengaruh media.

Dalam menyikapi maraknya pornografi, belum berkembang persepsi yang berangkat dari sudut pandang khalayak. Potensi khalayak yang bersikap kritis terhadap isi media masih belum menjadi perhatian utama. Kecenderungan ini menjadi indikator betapa kecerdasan media (media literacy) sebagai alternatif utama dalam menangkal pornografi masih belum menjadi kesadaran masyarakat. Ke depan barangkali perlu mendapat perhatian semuan pihak agar lebih memperhatikan kecerdasan media ini. Melalui

... dan keberpihakan dalam masyarakat. ...
... yang menjadi salah satu faktor ...
... yang menimbulkan ...
... yang menimbulkan ...
... yang menimbulkan ...
... yang menimbulkan ...
... yang menimbulkan ...
... yang menimbulkan ...
... yang menimbulkan ...

... yang menimbulkan ...
... yang menimbulkan ...
... yang menimbulkan ...
... yang menimbulkan ...
... yang menimbulkan ...
... yang menimbulkan ...
... yang menimbulkan ...
... yang menimbulkan ...
... yang menimbulkan ...

